

Indeks Keamanan: Perspektif Ilmu Kepolisian

Chryshnanda DL*

Abstrak:

Tulisan ini berupaya menunjukkan indeks keamanan dari perspektif ilmu kepolisian. Keamanan merupakan suatu benang merah dalam ilmu kepolisian untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Indeks dibuat sebagai sistem untuk memotret, melihat dan memperlakukan sesuatu dengan berbagai pendekatan yang dijabarkan dalam aspek-aspek, indikator-indikator atas sesuatu/gejala fakta sehingga dapat menjelaskan tingkat keakurasiannya. Indikator keamanan disusun dengan mendasari konsep demokrasi yang berarti keamanan dan didukung adanya rasa aman yang berkaitan dengan produktivitas. Makna produktivitas dikaitkan dengan kehidupan social society maupun political society. Keamanan dan rasa aman menjadi dasar untuk peningkatan kualitas keselamatan. Penyelesaian masalah keamanan dan rasa aman bukan untuk/ dengan kekuasaan, penguasaan namun diawali dengan menemukan dan memahami akar masalah yang dapat terekam dalam indeks keamanan yang dapat menjadi early warning system.

Kata Kunci : Indeks Keamanan, Ilmu Kepolisian

Pendahuluan

Ilmu kepolisian (*police science, police studies*, atau kajian kepolisian) menurut Profesor Parsudi Suparlan 1999(hal 35-43) didefinisikan : “Sebuah bidang ilmu pengetahuan¹ yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya peneghakkan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya”. Kegiatan-kegiatan ilmiah ilmu kepolisian, yang biasanya dilaksanakan dalam

pranata-pranata pendidikan atau dalam kegiatan penelitian. Kurikulum yang dikembangkan dalam ilmu tersebut adalah sesuai dengan fungsi polisi dalam masyarakat dan tugas-tugasnya. Lebih lanjut Suparlan 1999 menjelaskan : “Ilmu kepolisian sebagai ilmu pengetahuan untuk profesi, menekankan kajiannya pada pengidentifikasian masalah-masalah dan isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat serta pemecahannya secara profesional, karena itu pendekatan metodologinya menekankan pada pendekatan antar bidang (*interdisciplinary approach*). Sebuah ilmu pengetahuan ditandai oleh adanya paradigma yang membedakannya dari paradigma yang dipunyai oleh ilmu-ilmu lainnya “.

Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan semestinya dalam pengembangannya, mampu mengikuti bahkan melampaui perubahan-

1. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

* Dr. Chryshnanda DL, M.Si., Lulusan Program Doktorat Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia

perubahan zaman, serta dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pengakuan-pengakuan akan didapatkan tatkala ada keunggulan dari: (1) dosen/guru pengajarnya, (2) hasil didik/alumninya yang unggul dan mampu mengimplementasikan ilmunya dalam masyarakat; (3) program-program dan produk-produk unggulan yang menjadi kebanggaan bagi institusi pengguna dan masyarakat; (4) Konsep dan teori-teorinya mampu memperbaiki, cocok dan tepat bagi masa kini, dan mampu memprediksi atau menyiapkan masa depan yang lebih baik. Demikian halnya dengan kepolisian dimana untuk dapat tumbuh dan berkembang diperlukan ilmu kepolisian.

Banyak pakar yang mengeluarkan pendapat tentang ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian, mengacu pada pemikiran Profesor Parsudi Suparlan, dinyatakan sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang (1) masalah sosial dan penanganannya; (2) isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat; (3) keteraturan dan penataannya; (4) penegakan hukum dan keadilan; (5) penyelidikan dan penyidikan kriminalitas dan pencegahannya. Ilmu Kepolisian, sebagai dasar profesi Kepolisian, bersifat mempelajari apa yang dikerjakan atau yang menjadi pekerjaan polisi.

Pengalaman, pekerjaan, alam, permasalahan, berbagai fenomena lainnya dapat menjadi ilmu pengetahuan tatkala dipikirkan secara sistematis dan dikembangkan secara ilmiah (mengacu pada standar ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sebuah karya ilmiah) dan terus dibangun menjadi konsep-konsep dan teori-teori serta dapat ditunjukkan adanya epistemologinya, ontologi, metodologi serta aksiologinya². Pada awalnya pekerjaan-

pekerjaan pengamanan dikerjakan oleh pranata-pranata adat, dalam perkembangannya pekerjaan-pekerjaan pengamanan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang modern untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktifitas.

Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas-aktifitas, dan dalam kenyataannya, dalam proses aktifitas untuk menghasilkan produksi-produksi ada tantangan, hambatan, gangguan bahkan ancaman yang dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang memproduksi diperlukan aturan, norma, etika, hukum. Untuk menegakkan dan mengajak masyarakat mentaatinya diperlukan institusi yang menangani. Disinilah dapat dipelajari dan ditunjukkan bahwa keberadaan polisi adalah kebutuhan dari masyarakat akan adanya pelayanan keamanan dan rasa aman. Tatkala masyarakat semakin berkembang dan kehidupan semakin kompleks pekerjaan-pekerjaan pengamanan tidak lagi sederhana melainkan memerlukan kompetensi dan keahlian. Polisi yang awalnya sebagai craft saja sekarang telah menjadi profesi. Tatkala polisi menjadi profesi maka polisi diwajibkan untuk menjadi profesional. Pelaksanaan tugas-tugas yang profesional diperlukan kompetensi/ keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan.

Indeks (sistem pemotretan fakta) sebagai *Evident base Policy*

Indeks³ dibuat sebagai sistem untuk memotret, melihat dan memperlakukan sesuatu dengan berbagai pendekatan yang dijabarkan dalam aspek-aspek, indikator-indikator atas sesuatu/gejala fakta sehingga dapat menjelaskan tingkat keakurasiannya. Pada pembuatan indeks berbasis riset/ pengkajian atau setidaknya ada

2. Chryshnanda DL, 2015 : Epistemologi adalah sebuah kajian filsafat dan/ atau kajian itu sendiri, yaitu sebuah teori mengenai hakekat pengetahuan dari sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Ontologi adalah kejelasan mengenai keberadaan sesuatu bidang ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan bidang atau bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya. Aksiologi, adalah penjelasan mengenai hakekat nilai-nilai dan penilaian mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Metodologi adalah sebuah sistem berisikan prinsip-prinsip, praktik-praktik dan prosedur-prosedur yang dipunyai oleh

sesuatu bidang ilmu pengetahuan.

3. Penentuan unsur tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk.

sistem-sistem *filling and recording* dan analisisnya. Dari data-data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi kinerja-kinerja profesional/ bahan-bahan kajian data teknologi dan sistem-sistem analisisnya.

Kehebatan/ keunggulan dari sebuah institusi/ birokrasi dilihat dari sistem pencatatan dan pendataannya. Data dijadikan dasar untuk membuat keputusan/ kebijakan-kebijakan yang mampu memperbaiki kesalahan masa lalu, menganalisa kebutuhan dan harapan bahkan ancaman di masa kini dan mampu memprediksi untuk menyiapkan masa depan yang baik. Sistem data akan semakin dibutuhkan di era digital dan untuk mendukung pembangunan sistem-sistem pelayanan prima. Data dengan segala sistem-sistemnya hendaknya diwadahi dalam *back office* yang bisa terkoneksi satu dengan lainnya. Data juga dikelola dan selalu *up to date*, yang tatkala dianalisa dengan baik dan benar akan mampu menghasilkan produk-produk yang berguna bagi antar fungsi secara internal maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya. Sistem-sistem analisa ini akan menunjukkan tingkat kepiawaian dan keahliannya dalam mengolah data sehingga mampu untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap di masa kini dan mampu menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kreatif bagi penyiapan di masa depan. Sistem analisa data inilah merupakan cara berpikir secara konseptual maupun teoritikal yang memanfaatkan pola-pola riset ilmiah yang bisa dengan mengkonstruksi maupun mendekonstruksi untuk menemukan makna apa yang ada di balik gejala/fakta secara holistik/ sistemik. Dengan demikian dari pengolahan dan analisa data akan mampu menghasilkan model-model yang merupakan produk bagi pengimplementasian maupun pencegahan, perbaikan, peningkatan bahkan pengembangan serta pembangunan.

Indeks untuk menunjukkan potret/ gambaran yang dapat mengindikasikan kondisi

real yang ada berdasar dari sistem pengkuruan secara kuantitatif. Indeks bisa dianalisa secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai *early warning*⁴ untuk memprediksi, menyiapkan sebagai solusi. Dengan adanya indeks maka dapat dilakukan OHA⁵ (*Organization Health Audit*) maupun dari ES (*Environmental Scanningnya*)⁶. Dari OHA dan ES maka tatkala dianalisa secara SWOT (*strenght, weakness, opportunity and threat*)⁷ atau dengan cara-cara lain akan dapat dilihat atau diprediksi EFAS (*Environmental Factor Analysis Scaning*)⁸ maupun secara IFAS (*Internal Factor Analysis Scaning*)⁹ dari indikator dan ditemukan angka-angka yang dapat menunjukkan posisi birokrasi/ institusi maupun dari kondisi masyarakat. Dalam menentukan analisa ini diperlukan adanya data yang tepat dengan indeks yang terinci dalam berbagai indikatornya. EFAS, IFAS memang bukan riset melainkan sebagai upaya mendapatkan *early warning* maupun *evident base* dalam pengambilan *policy/* keputusan-keputusan yang diambil sehingga tepat sah dan mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan, siap memenuhi tuntutan harapan, tantangan bahkan ancaman di masa kini serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Di dalam membangun indeks ini tentu kepekaan dan kepiawaian dalam mengkategorikan berbagai indikator ini harus dilatih dan dibuat pedoman/ alat untuk menentukan besaran indeks. Lagi-

4. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin tentang kemungkinan datangnya ancaman, bahaya, dan sebagainya (<http://edefinisi.com/sistem-peringatan-dini.html>)
5. OHA adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
6. Environmental Scanning merupakan suatu proses pengambilan keputusan, analisis, penguraian informasi dan bagaimana organisasi menggunakan informasi eksternal perusahaan yang melibatkan sejumlah orang yang berada di perusahaan. Fahey dan Narayanan (dalam Morrison, 1992)
7. Menurut Drs. Robert Simbolon, MPA (1999), analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal...
8. Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal yang dapat mempengaruhi dimasa yang akan datang.
9. Menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi dimasa yang akan datang.

lagi data ini tanpa kemampuan analisa memang akan menjadi lamban/ tidak bermanfaat karena data mentah yang belum dianalisa dan belum diberi makna akan sama saja dengan sampah. Pembuatan indeks sangat penting sebagai *early warning* sehingga dapat menjadi *evident base* bagi pengambilan keputusan.

Indikator keamanan disusun dengan mendasari konsep demokrasi yang berarti keamanan dan didukung adanya rasa aman yang berkaitan dengan produktivitas. Makna produktivitas dikaitkan dengan kehidupan *social society* maupun *political society*. Mengapa demikian? Dalam masyarakat yang demokratis untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktivitas, yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas. Proses aktivitas tersebut dapat dirasakan adanya keamanan dan rasa aman warga dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan, yang bisa menghambat, merusak bahkan mematikan produktivitas.

Indikator Keamanan dilihat dari kondisi rasa aman yaitu aman secara fisik maupun psikis, baik secara pribadi maupun kelompok/ komunitas terbebas dari ancaman, hambatan, gangguan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, transportasi/ lalu lintas. Indikator-indikator keamanan merupakan tujuan atau sasaran pencapaian suatu kondisi dalam *politic society* maupun *social society* yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indikator Keamanan dan rasa aman dalam masyarakat yang modern dan demokratis

Keamanan merupakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dalam proses produktivitas agar masyarakat dapat mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang. Keamanan demi manusia/ untuk mengangkat harkat dan martabat manusia adalah keamanan mampu memberi rasa aman. Aman belum tentu merasa aman, sebaliknya tatkala ada rasa aman maka

keamanan dapat dipastikan ada.

Aman karena keterpaksaan/ dipaksa harus membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok tertentu rasa aman tidak ada, karena selalu dibayangi rasa was-was/ ketakutan/ di bawah tekanan/ ancaman. Pengaman yang dipegang/ dikuasai oleh preman dan oknum-oknum aparat yang berada di belakang preman sebenarnya mereka tidak mengamankan, melainkan mereka menjadi benalu dengan alasan keamanan/ mengamankan.

Apapun alasannya tatkala aman hanya menjadi bungkus pemerasan/penyuapan ini merupakan keamanan semu, karena akan kontra produktif, karena ujung-ujungnya yang harus rela menjadi korban adalah rakyatnya. Keamanan dan rasa aman semestinya menjadi satu kesatuan yang dapat dilihat, diukur, dirasakan adanya peningkatan produktivitas warga masyarakat. Selama masih ada palak memalak, permainan-permainan ilegal, preman dan premanisme rasa aman belum sepenuhnya tercapai. Keamanan dan rasa aman dalam masyarakat yang modern dan demokratis tidak boleh lagi menjadi dasar/ alasan siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum (memeras/ menerima suap).

Keamanan dan rasa aman dapat ditandai adanya : 1. *Good governance*, aparaturnya yang profesional dan tidak memeras/ menerima suap; 2. Keamanan yang ditangani secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan; 3. Pelayanan kepada publik yang prima; 4. Tingkat keamanan dan rasa aman warga yang cukup tinggi; 5. Penegakkan hukum yang tegas dan berwibawa (tidak KKN/ tidak tebang pilih); 6. Ada *board* yang merupakan wadah para pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Indeks Keamanan dapat dilihat dalam bidang ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya:

- a. Ideologi : 1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, 2) Terwujudnya Kebebasan beragama/berkeyakinan, 3) Terlindunginya kelompok minoritas, 4) Ketahanan masyarakat dari radikalisme, 5) Kondisi terbebas dari terorisme, 6) Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan primordial mampu membuat suasana sejuk dan mencegah terjadinya konflik, 7) Berkembangnya program-program deradikalisme dan 8) Terbebasnya dari ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila.
- b. Politik : 1) Kebijakan-kebijakan dari political society diterima dan mendapat dukungan dari civil society 2) Pemilu, Pilkada dapat terselenggara pada setiap tahapannya tanpa konflik fisik maupun pertumpahan darah, 3) Pejabat-pejabat politik mampu menjadi ikon dan mampu mencegah terjadinya konflik politik, 4) Masyarakat mempunyai ketahanan terhadap issue- issue politik, 5) Produk-produk politik dirasakan memihak dan bermanfaat bagi peningkatan masyarakat, 6) Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perpolitikan (*white collar crime*).
- c. Ekonomi : 1) Tersedianya BBM, gas dan sembako, 2) Kemampuan masyarakat membeli BBM, gas dan sembako, 3) Ketahanan masyarakat dari berbagai potensi-potensi konflik di bidang ekonomi, 4) Meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri (ekspor/ impor), 5) Pelaku-pelaku bisnis mempunyai etika dalam berbisnis (tidak melakukan hal-hal yang kontra produktif), 6) Pelaku-Pelaku bisnis mampu mencegah terjadinya konflik ekonomi, 7) Ketahanan ekonomi dari globalisasi, regionalisasi, 8) Ketahanan moneter dari inflasi, 9) Terbebas dari berbagai kejahatan-

kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perekonomian.

- d. Sosial Budaya : 1) Terbebas dari konflik antar warga, 2) Terbebas dari premanisme, 3) Kondisi masyarakat yang damai dan kondusif, 4) Terbebas dari issue-issue konflik sosial, 5) Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan yang menjadi potensi konflik sosial, 6) Ada wadah-wadah kemitraan untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi penanganan masalah-masalah konflik sosial, 7) Tertangani berbagai kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, 8) Tertangani masalah-masalah lalu lintas (kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan), 9) Tingkat Kamseltibcar Lantas yang signifikan pendukung produktifitas masyarakat.

Indikator-indikator keamanan tersebut perlu penjabaran dan pengembangan sampai pada tingkat implementasinya dan ada penilaian sebagai kontrol pencapaian tujuan. Indikator pengaman ini dalam operasionalnya dilaksanakan lintas fungsi, lintas stake holder yang secara bersama-sama di implementasikan untuk dapat menemukan akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Aspek Indikator Keamanan

Aspek dari Indikator Keamanan Dalam Negeri adalah : a. *Good Governance*, b. Keamanan berbasis *integrated system*, c. *Public service*, d. Keamanan Masyarakat, e. Board (badan /wadah independen untuk penyeimbang/ kontrol sosial).

Variabel :

a. *Good governance*

1. Produk hukum yang merupakan refleksi kesepakatan bersama untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial untuk melindungi, mengangkat harkat dan martabat manusia yang produktif.
2. Profesionalisme para aparatur penyelenggara negara dari legislatif,

eksekutif dan yudikatif.

3. Modernitas (*system online* yang berbasis IT) sebagai bagian dari implementasi dalam birokrasi yang modern di era digital.
 4. Kebijakan (*Political will*) yang berpihak kepada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 5. Sinergitas antara pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan pelayanan kepada publik yang berstandar pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses).
 6. Etika dan integritas publik
- b. Keamanan berbasis *integrated system*
1. Tersedianya *back office*. Dalam era digital para aparatur penyelenggara negara sudah saatnya membangun sistem *back office*, aplikasi dan network untuk dapat memberikan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Dalam *back office* ada sistem situpak :1. Situasi (peta/ pemetaan), 2. Tugas-tugas pokok (job description dan job analysis), 3. Pelaksanaan tugas (sistem pengoperasionalan : rutin, khusus dan kontijensi), 4. Sistem administrasi (SDM, perencanaan, sarparas, anggaran), 5. Pelaporan, 6. Komando dan pengendalian. Model *Back office* adalah sebagai pusat K3i (kodal, koordinasi, komunikasi dan informasi):
 - 1) Kodal (komando dan pengendalian) berisi sistem aplikasi untuk : a. Mengawasi, memantau; b. Struktur komando/perintah; c. Analisa pengoperasionalan sehingga akan cepat dan memudahkan di dalam
 - 2) Koordinasi : berisi sistem aplikasi jejaring/ network baik dalam internal maupun eksternal sebagai *soft power*.
 - 3) Komunikasi : berisi sistem aplikasi komunikasi secara langsung/ melalui media baik dari internal ke eksternal maupun dari eksternal ke internal.
 - 4) Informasi : berisi sistem aplikasi:
 - a. *filling and recording* (sistem pencatatan dan pendataan), b. *searching* (cari dan temu), c. *filtering* (pengkategorian/ pengelompokan), d. *rating* (peringkat), e. *timing* (waktu), f. *Emergency* (darurat), g. *early warning* (peringatan dini), h. Kontijensi (faktor alam, faktor kerusakan infrastruktur dan faktor manusia yang berdampak luas), i. rayonisasi.
 2. *Online* sistem antar stake holder. Sistem-sistem *online* (terhubung) menjadi dunia baru di era digital yang penuh harapan, tantangan bahkan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia. Harapan di dunia terhubung akan banyak hal yang dalam kebutuhan kehidupan manusia menjadi lebih mudah, cepat seakan menembuas ruang dan waktu. Di semua ujung, penjuru dan belahan dunia dapat diketahui dalam waktu yang sama (*on time*). Sebagai contoh mesin dan aplikasi pencarian, penjawaban berbagai informasi semakin cepat, semakin mudah, semakin akurat. Apa saja ada dalam dunia maya dan bisa menjadi nyata. Segala yang virtual telah menjadi aktual. Harapan hidup menjadi lebih baik akan terhubung dalam komunikasi, informasi dan transformasi.

3. Pemetaan wilayah, masalah dan potensi. Memetakan wilayah, masalah dan potensi sedetail-detailnya perlu dilakukan sehingga dapat dianalisa sumber-sumber daya yang ada dan potensi-potensi konflik yang ada. Termasuk label-label, isu-isu, bahkan kebencian dari satu kelompok dengan kelompok lainya.

4. SOP. Standard Operational Procedure (SOP) bagi institusi yang bekerja secara profesional merupakan pilar untuk mampu bertahan, tumbuh, berkembang bahkan mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Bagi birokrasi yang tanpa kompetitor dengan SOP dapat menunjukkan kualitas kinerja dan standar mutu atas apa yang dikerjakan/ dibuatnya. SOP menjadi standar-standar yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan tingkat profesionalitas kerjanya. *Standard Operational Procedure (SOP)* setidaknya mencakup :

1) Job description dan job analysis yang berisi jabaran tugas dan analisa pekerjaan / beban tugas termasuk resiko tugas yang dibuat secara bertingkat-tingkat dan bervariasi disesuaikan dengan fungsi, bagian, bidang tugasnya.

2) Standardisasi keberhasilan tugas yang mengacu dari point 1 yang juga bertingkat-tingkat dan bervariasi. Isi keberhasilan tugas mencakup dengan : a. Kepemimpinan, b. Administrasi (SDM, perencanaan dan program-program, sarpras/ teknologi dan IT (perorangan, kelompok/unit dan kesatuan), anggaran), c. Operasional (sesuai fungsi bidang tugasnya) yang bersifat rutin, khusus dan

kontijensi, d. *Capacity building* (kreatifitas/inovasi). Point-point tersebut dibuat dalam standar angka/ tingkat keberhasilannya yang menjadi pedoman nilai dari point-point keberhasilannya.

3) Sistem penilaian kinerja berisi sistem penilaian berdasar angka-angka untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berhasil pada point 2 bisa menggunakan angka/ huruf. Penilaian kinerja ini sebagai raport penilaian atas hasil kerja para pekerja dan untuk menunjukkan tingkat kualitas kerjanya.

4) Sistem reward dan punishment yang juga dibuat sebagai dasar untuk mengapresiasi yang berprestasi dan menindak bagi yang menyimpang/ melanggar. Ini dibuat juga secara bertingkat-tingkat dan bervariasi.

5) Etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (*do dan don't*)

Standard Operational Procedure (SOP) tatkala bisa diterapkan dengan baik akan memperkuat institusi/ korporasi, namun tatkala diabaikan sebenarnya tinggal menunggu waktu ambruk / ditinggalkan.

5. Tim transformasi. Tim transformasi sebagai tim kendali mutu, tim backup yang menampung ide-ide dari bawah (*bottom up*) untuk dijadikan kebijakan maupun penjabaran kebijakan-kebijakan dari atas (*top down*). Tim ini sebagai dirigen untuk terwujudnya harmonisasi dalam dan di luar birokrasi. Dan melakukan monitoring dan evaluasi atas program-program yang diimplementasikan maupun

menghasilkan program-program baru.

b. *Public service*

1. Penyediaan publik infrastruktur transportasi. Transportasi yang dikelola secara profesional menjadi penting bagi masyarakat karena : 1. Untuk melayani pergerakan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, 2. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi, 3. Ekonomis, biaya murah, dan mudah dijangkau, 4. Menjadi penghubung antar daerah dengan daerah lain, 5. Menjadi ikon/ simbol kota, simbol kemajuan/ simbol pariwisata dan menjadi pilihan utama masyarakat, 6. Aman, nyaman, tepat waktu, 7. Mendukung tingkat produktivitas masyarakat.
2. Penegakkan hukum. Hukum sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga, melindungi, mengatur, mendidik masyarakat agar dalam tata kehidupan sosialnya dapat berjalan saling mendukung dan melengkapi dan mampu mendukung meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Tugas polisi mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yang salah satunya adalah menegakkan hukum. Agar hukum menjadi hidup dan mampu berfungsi sebagaimana yang seharusnya.
3. Penegakkan hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan melihat faktor perbuatannya (tindakanya), pertanggung jawabannya, dan pidananya dengan membuktikan apakah tersangka benar-benar bersalah dan layak dikenai hukuman atau sanksi pidana. Dalam implementasinya, polisi memiliki kewenangan diskresi di luar jalur hukum untuk kepentingan umum,

kemanusiaan, keadilan, dan edukasi. Sebaliknya, dalam menangani perkara atau kasus yang kontraproduktif dan bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas bisa dilakukan penindakan dengan penenaan pasal berlapis walaupun dalam satu peristiwa atau perkara pidana tidak boleh dijatuhi dengan hukuman yang sama. Pemenuhan rasa keadilan dalam penegakkan hukum memang harus dimiliki dan diyakini oleh para penegak hukum. Terutama para petugas polisi, mereka tidak hanya sekadar menerapkan pasal-pasalnya tetapi memberi efek pencegahan, perlindungan korban dan para pencari keadilan, membangun kepatuhan hukum serta wibawa sebagai sandaran bagi penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

4. Modernitas. Modernitas dalam konteks ini adalah kemajuan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan dukungan teknologi, pekerjaan akan mampu dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.
 5. Saluran *public complain* (kepekaan, kepedulian dan budaya malu). Merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kepekaan dan kepedulian dengan melibatkan warga masyarakat dengan memotret dan mengupload foto-foto pelanggaran.
- #### c. *Keamanan Masyarakat*
1. Tingkat kriminalitas.
 2. Tingkat kesadaran dan ketaatan hukum.
 3. Tingkat literasi.
 4. Tingkat modernitas (kecepatan dan

kedekatan pelayanan publik).

5. Tingkat harmonisasi sosial (*human security*).

- d. *Board* (badan /wadah independen untuk penyeimbang/ kontrol sosial). Peran dan fungsi forum adalah untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (khususnya yang berkaitan dengan keamanan). Dalam konteks ini, lebih ditekankan pada tindakan-tindakan pencegahan yang merupakan hasil pemikiran untuk mencari solusi-solusi dan langkah-langkah yang terbaik atau tepat untuk menciptakan dan menjaga rasa aman dan keamanan warga. Forum ini dapat dibuat pada tingkat : 1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kabupaten/ kota.

Indikator-indikator keamanan tersebut perlu penjabaran dan pengembangan sampai pada tingkat implementasinya dan ada penilaian sebagai kontrol pencapaian tujuan. Indikator pengaman ini dalam operasionalnya dilaksanakan lintas fungsi, lintas stake holder yang secara bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Polisi dan pemolisiannya

Polisi bekerja melalui pemolisian. Pemolisian adalah segala usaha dan upaya untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (Kamtibmas) pada tingkat managerial dan operasional baik dengan atau tanpa upaya paksa. Pemolisian dapat menjadi suatu karakter bagi institusi kepolisian yang dapat dibangun menjadi model yang bervariasi antara satu tempat dengan yang lainnya. Model pemolisian dapat dibangun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara,

kesejahteraan masyarakat, kemajuan institusi Kepolisian.

- b. Wilayah, masalah yang di hadapi, potensi-potensi yang bisa diberdayakan, corak masyarakat dan kebudayaannya, nilai-nilai kearifan lokal dan sebagainya.
- c. Fungsi dan tugas pokok polisi baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai petugas kepolisian. Arah untuk menuju kepolisian sebagai institusi yang profesional (ahli), cerdas (kreatif dan inovatif), bermoral (berbasis pada kesadaran, tanggung jawab dan disiplin) dan modern (berbasis IT).
- d. Model-model pembinaan baik untuk kepemimpinan, bidang Administrasi, bidang operasional maupun Capacity Buiding.

Dalam membangun pemolisian di era digital Perlu pemikiran-pemikiran secara konseptual dan bertindak pragmatis yang saling melengkapi dan menjadi suatu sistem. Tatkala kita membangun sistem yang perlu diperhatikan adalah masukan (*input*), proses (cara mencapainya) maupun keluaranya (*output*), yang memerlukan adanya standar-standar baku sebagai pedoman Operasionalnya (SOP : a) Job description dan Job analysis, b) Standardisasi keberhasilan tugas, c) Sistem penilaian kinerja, d) Sistem Reward dan Punishment, dan e) Etika Kerja).

Model pemolisian dapat dibuat 3 kategori : 1. Berbasis wilayah, 2. Berbasis kepentingan dan 3. Berbasis dampak masalah. Ke tiga kategori tersebut memiliki pendekatan yang berbeda namun ada benang merahnya yang menunjukkan adanya saling keterkaitan satu dengan lainnya. Model pemolisian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar/ pedoman dalam mengimplementasikannya, walaupun berbeda variasinya (berdasarkan corak masyarakat dan kebudayaannya) namun tetap memiliki prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum. " *Satu*

Prinsip Seribu Gaya".

a. Pemolisian yang Berbasis Wilayah.

Model ini boleh dikatakan sebagai model struktural dari tingkat Mabes sampai dengan Polpos bahkan bisa jadi pada Babin kamtibmas. Semua tingkatannya di batasi wilayah hukum (bisa mengikuti pola pemerintahan/ ada pola-pola khusus seperti yang diterapkan di Polda Metro Jaya yang wilayahnya ada 3 Propinsi (DKI, Banten dan Jawa Barat). Ada Polres yang membawahi lebih satu wilayah Kota/ Kabupaten. Ada juga wilayah Polsek yang lebih dari 1 Kecamatan. Pada tingkat Polpos dan Babin kamtibmas ini yang perlu dibuat secara konsisten/ ada modelnya. Di dalam pemolisianya akan berkaitan dengan penanganan-penanganan masalah, kepentingan-kepentingan. Di sinilah ada saling keterkaitan antara model yang berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan maupun yang berbasis wilayah. Pertanyaannya : " bagaimana membangun sistem terpadu yang saling mengisi dan saling melengkapi serta saling menguatkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (Kamtibmas)?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan membangun *back office* (sebagai *linking pin*/ pusat K4Ei (komunikasi, komando dan pengendalian, koordinasi, kontrol dan monitoring, evaluasi serta informasi)). *Back office* ini merupakan ruang operasi untuk mengharmonikan (kalau analogikan adalah dirigen dalam sebuah *orchestra*) pekerjaan yang diselenggarakan antar wilayah, fungsi/ bagian, maupun dalam kondisi yang diskenariokan, atau kondisi-kondisi kontijensi baik dari faktor manusia, faktor alam maupun faktor kerusakan infrastruktur. *Back office* ini merupakan sistem terpadu yang mampu membangun *database*, komunikasi, komando dan pengendalian, koordinasi, kontrol dan monitoring, evaluasi serta informasi.

Yang mampu memberikan pelayanan prima dengan pemolisian yang profesional, cerdas, bermoral dan modern. Untuk itu diperlukan keunggulan-keunggulan dalam mengimplementasikannya yaitu: a. Unggul SDM, b. Unggul data, c. Unggul Pemimpin dan Kepemimpinnya, d. Unggul Sarpras (berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, e. Unggul Jejaring, dan f. Unggul Anggaran.

b. Pemolisian yang Berbasis Kepentingan.

Model pemolisian yang berbasis kepentingan tidak dibatasi wilayah, namun dipersatukan oleh kepentingan-kepentingan bersama. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa yang berkaitan: dengan pekerjaan/ profesi, hobby, kegiatan, kelompok-kelompok kemasyarakatan. Model ini diimplementasikan secara variasi oleh fungsi-fungsi kepolisian yang ada pada pemolisian berbasis wilayah (Mabes sd Polsek) sesuai dengan kategori-kategori kepentingannya (internasional, regional, nasional, maupun tingkat lokal). Melalui keunggulan-keunggulan tersebut di atas yang di harmonisasikan oleh petugas-petugas di *back office* maka walaupun pemolisianya pada tingkat lokal sekalipun namun dampaknya dapat menjadi global karena ada sistem-sistem dasar dan pendukungnya yang saling terkait.

c. Pemolisian yang Berbasis Dampak Masalah.

Akar masalah ini bukan tugas polisi namun merupakan potensi konflik dan dampaknya dapat menjadi konflik yang dapat mengganggu, menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Yang tentu saja akan menjadi tugas kepolisian tatkala menjadi gangguan terhadap keteraturan sosial. Pola pemolisianya akan juga berkaitan dengan yang berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan namun polanya berbeda karena penangananya dengan pola khusus atau

yang tidak bersifat rutin, walaupun dapat memanfaatkan sistem-sistem *back office*. Pola penanganan terhadap dampak masalah ini ditangani dengan membentuk satuan-satuan tugas (Satgas) yang juga bervariasi karena juga akan berbeda dampak masalah dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, keselamatan dan sebagainya.

- d. Pemolisian yang berbasis dampak masalah merupakan pemolisian untuk menangani berbagai dampak yang sebenarnya bukan bagian dari urusan kepolisian. Namun ketika menjadi masalah dampaknya akan mengganggu, mengancam, merusak bahkan bisa mematikan produktifitas. Di sinilah *core* dari model pemolisian yang berbasis dampak masalah yang penanganannya diperlukan keterpaduan/ integrasi dari pemangku kepentingan ataupun antar satuan fungsi. Dengan membangun model pemolisian yang berbasis dampak masalah akan dapat menjadi wadah untuk mensinergikan, mengharmonikan dalam menangani berbagai masalah (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan bahkan pertahanan) sehingga menemukan solusi-solusi tepat yang dapat diterima semua pihak dan dapat digunakan untuk pra, saat maupun pasca. Keterpaduan inilah yang menjadi kecepatan, ketepatan bahkan kekuatan sosial dan akan juga menjadi ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai dampak masalah bahkan dampak globalisasi.

Penutup

Keamanan dan rasa aman menjadi dasar untuk peningkatan kualitas keselamatan. Penyelesaian masalah keamanan dan rasa aman bukan untuk/ dengan kekuasaan, penguasaan namun diawali dengan menemukan dan memahami akar masalah yang dapat terekam dalam indeks keamanan yang dapat menjadi *early*

warning system. Dari potret situasi keamanan terekam dalam indeks keamanan tersebut dapat dicari akar masalah dan ditemukan solusi-solusi secara tepat dan dapat di implementasikan. Dinamika perubahan yang bergulir dengan cepat muncul berbagai isue yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan keteraturan sosial yang akan berdampak pada semakin kompleksnya tugas-tugas kepolisian.

Di era digital dituntut adanya berbagai pelayanan yang serba : cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Di era kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat berdampak terjadinya globalisasi. Selain segi positif globalisasi juga membawa permasalahan sosial yang berkaitan dengan gangguan keamanan yang terjadi dalam masyarakat akan semakin kompleks dan semakin canggih karena semakin sistematis terorganisir secara profesional dan memanfaatkan teknologi dan peralatan-peralatan modern yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli/ profesional. Tentu saja akan semakin sulit untuk dicegah, dilacak dan dibuktikan. Selain itu tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya dapat memberikan adanya pelayanan prima. Pelayanan prima kepolisian dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan pembangunan sistem-sistem yang diawali dengan sistem filling and recording, analisa data yang dapat menghasilkan indeks, pemetaan masalah melalui solusi-solusi tepat yang didukung dengan sistem-sistem online yang dapat dimasukkan sebagai pemolisian secara elektronik (*e-Policing*).

Daftar Pustaka

- Ainsworth, Peter B. and Ken Pease. 1987. *Police Work (Psychology in Action)*. United Kingdom: Routledge
- Andrain, Harles 1992. *Kehidupan Politik*

dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Bayley, William G. 1995. *The Encyclopedia of Police Science (second edition)*. New York & London: Garland Publishing.

Bayley David H, 1994, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.

Bahtiar, Hasrya W. 1994. *Ilmu Kepolisian: suatu cabang ilmu baru*. Jakarta: PTIK- Gramedia.

Chryshnanda, 2015, *Electronic Policing: Pemolisian di Era Digital*, Jakarta, YPKIK

Denzin, NK & Lincoln, YS. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Friedmann, Robert. 1992. *Community Policing* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal.

Kasim, Azhar. 1993. *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

-----, 1995. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Kratcoski, Peter and Duane Dukes. 1995. *Issues in Community Policing*. Academy of Criminal Justice System (ACJS), Northern Kentucky University.

Kunarto, 1995. *Polisi harapan dan Kenyataan*. Klaten: CV Sahabat.

-----, 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta manunggal.

-----, 1998. *Tri Brata*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Meliala, Adarianus. 1999. *Kumpulan tulisan menjelang dan Sesudah Polri Keluar dari ABRI*. Universitas Indonesia.

-----, 2002. *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Kanisius.

More. 1998. *Special Topics in Policing*. Cincinnati: Andarieson Publishing.

Popper, Karl. 1959. *The Logic of Scientific Discovery*. New York: Basic Books.

Rahardjo, Satjipto. 1998. "Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi". Makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi.

-----, 2002, *Polisi Sipil*. Jakarta: Gramedia.

Reiner, Robert. 2000. *The Politic of The Police*. Oxford University Press.

Suparlan, Parsudi. 1997. "Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat". Diskusi angkatan I KIK Program S2 UI.

-----, 1999a. "Etika Publik polisi indonesia", Makalah sarasehan tanpa penerbit.

-----, 1999b. "Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah", Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman.

-----, 1999c. "Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat", Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis PTIK ke-53.

-----, 2001. "Kajian Ilmu Kepolisian" Partnership Governance Reform in Indonesia, 23-24 oktober 2001.

Suseno, Frans Magniz. 1999. *Kuasa dan moral*. Jakarta: Gramedia.

-----, 1999. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

Trojanowicz, Robert. 1998. *Community Policing: How To Get Started* (co-authored with policing.com's Bonnie Bucqueroux: Cincinnati: Anderson Publishing.